



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZIZAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. NHK : 224400

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 981.112.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/185 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.392.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/130 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.440.000
3. Tanah Seluas 165 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.280.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 281.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 542.172**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.272.654.172**III. HUTANG** Rp. 15.777.720



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.256.876.452

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.